

Optimalisasi Peran Masjid Raya Baiturrahman dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Manajemen Keuangan

Irsanul Husna,¹ Khairul Habibi²

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima 10 Juni 2025

Revisi 28 Juni 2025

Disetujui 30 Juli 2025

Publish 10 Agustus 2025

Keyword:

Management,
Economic Empowerment of the
People, Mosque, Finance

* Corresponding author

e-mail:

200403059@student.ar-raniry.ac.id

Khairul.habibi@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of people's economic empowerment at the Baiturrahman Grand Mosque, Banda Aceh City. The mosque not only functions as a center of worship, but also has great potential as a center of social and economic activity for the community. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the financial and asset management of the Baiturrahman Grand Mosque has been running professionally under the Regional Public Service Agency (BLUD) UPTD of the Aceh Islamic Sharia Office. Various economic activities, such as parking management, organizing weddings, and managing zakat, waqf and alms funds, have had a positive impact on the economic empowerment of the surrounding community. However, challenges such as the limited managerial capacity of the management and the need for transparency and accountability still need to be addressed. This study recommends strengthening management, increasing the capacity of the board, and developing partnerships with Islamic financial institutions and the government to optimize the role of the mosque as a center for community economic empowerment. The findings are expected to serve as a model for other mosques in developing mosque-based economic empowerment programs.

Page: 140 - 156

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset Masjid Raya Baiturrahman telah berjalan secara profesional di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Dinas Syariat Islam Aceh. Berbagai aktivitas ekonomi, seperti pengelolaan parkir, penyelenggaraan pernikahan, serta pengelolaan dana zakat, wakaf, dan sedekah, telah memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan kapasitas manajerial pengurus dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas masih perlu diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen, peningkatan kapasitas pengurus, serta pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi model bagi masjid-masjid lain dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Kata kunci: Manajemen, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Masjid, Keuangan

PENDAHULUAN

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi. Secara

tradisional, masjid berperan sebagai lokasi utama untuk shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat jenazah, dan berbagai kegiatan ibadah lainnya. Masjid juga menjadi tempat pelaksanaan pernikahan, bisnis, pengumpulan dan distribusi sedekah, tempat penampungan tunawisma, tempat tinggal kaum bertakwa, serta wadah berkumpul dan bermusyawarah bagi masyarakat muslim. Masjid menjadi simbol persatuan, tempat saling memberi nasihat, serta menumbuhkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan solidaritas sosial. (Ikhwan, 2013). Keberadaan masjid sebagai perwujudan aspirasi umat Islam sangatlah penting. Fungsi sentralnya tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pembinaan masjid perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi fisik bangunan maupun pengelolaan kegiatan pemakmuran. Masjid yang dikelola dengan baik akan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, mengingat posisinya yang sangat strategis dan dekat dengan masyarakat akar rumput. Pada masa Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat peradaban Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Rasulullah dan para sahabat memanfaatkan masjid untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini menjadi solusi atas berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, yang selalu ada sepanjang zaman. (Haramain & Dakwah, 2025). Keberadaan masjid pada masa itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sehingga tumbuh rasa cinta dan keterikatan yang kuat antara umat dan masjid. (Susilo, 2016).

Sejarah mencatat, masjid selalu menjadi pusat aktivitas umat Islam, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Masjid Nabawi, misalnya, tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu dan berdiskusi tentang berbagai persoalan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Aktivitas pemberdayaan ekonomi berbasis masjid telah menjadi tradisi sejak masa Rasulullah dan diteruskan oleh para khalifah serta dinasti-dinasti Islam berikutnya. (Ikhwan, 2013) Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran sentral dalam membangun peradaban Islam yang kuat dan mandiri.

Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat belum sepenuhnya optimal. Banyak masjid yang hanya berfokus pada kegiatan ibadah ritual, sementara potensi besar sebagai pusat ekonomi masyarakat belum dimaksimalkan. Penelitian di beberapa daerah, termasuk Aceh, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masjid yang memiliki program pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Padahal, masjid memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi umat melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta pengembangan usaha-usaha produktif yang melibatkan masyarakat sekitar.

Pemberdayaan ekonomi umat sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masjid, sebagai entitas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya pemberdayaan ini. Namun, masih banyak masjid yang memiliki dana cukup besar tetapi tidak jelas sasaran penggunaannya, sementara masjid lain yang progresif justru kekurangan dana untuk mengembangkan program-program pemberdayaan. (Layyinaturrobaniyah, 2019).

Kondisi ini menuntut adanya manajemen yang baik dan transparan agar potensi masjid dapat dimanfaatkan secara optimal. Masjid memiliki beragam fungsi, tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan umat. (Rika Widianita, 2023) Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masjid dan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan umat. Said Tuhuleley, masjid memiliki misi sebagai wahana pembersihan diri, pusat ibadah, dan juga pusat pembebasan serta pemberdayaan, agar manusia tidak diperbudak oleh sesamanya maupun makhluk lainnya. (Hanafiah, 2011) Namun, fungsi-fungsi ini seringkali tidak lagi terlihat dalam pengelolaan masjid di era modern.

Penelitian mengenai revitalisasi fungsi masjid di beberapa daerah di Aceh menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masjid yang memiliki kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal, masjid-masjid besar seperti Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Raya Baiturrahman adalah masjid bersejarah yang menjadi simbol agama, budaya, semangat kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan landmark kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh. Masjid ini juga selamat dari bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, sehingga menjadi simbol ketahanan dan kebanggaan masyarakat Aceh. (Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

Seiring berjalannya waktu, Masjid Raya Baiturrahman terus mengalami renovasi dan pengembangan yang signifikan, sehingga memberikan daya tarik bagi umat Islam baik dari dalam maupun luar kota Banda Aceh. Sebagai masjid yang menjadi patokan kiblat

masyarakat Aceh, Masjid Raya Baiturrahman juga berpotensi menjadi wadah bagi masyarakat kurang mampu untuk memperbaiki pola kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Masjid ini dapat menyediakan sarana-prasarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, memanfaatkan tempat usaha yang disediakan oleh masjid, hingga hasil yang didapatkan dapat menjadi keuntungan bersama bagi masjid dan masyarakat. (Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

Namun, menurut pandangan peneliti, hingga saat ini belum ada transparansi yang jelas mengenai bentuk dan mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh Masjid Raya Baiturrahman. Padahal, tujuan utama pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah menjembatani kebutuhan masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat yang membutuhkan. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7. Yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr:7).

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi harta agar tidak hanya beredar di antara orang kaya saja, melainkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengapa Masjid Raya Baiturrahman belum memiliki transparansi dalam manajemen pemberdayaan ekonomi umat di kota Banda Aceh.

KAJIAN TEORI

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks Islam, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara material, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan solidaritas antarumat. Salah satu institusi yang sangat potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah masjid. (Diri et al., 2016). Masjid, secara historis dan konseptual, bukan hanya tempat ibadah ritual seperti shalat dan dzikir, tetapi juga pusat

aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi.(Layyinaturrobaniyah, 2019). Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah menjadi pusat pengembangan peradaban Islam. Di Masjid Nabawi, misalnya, Rasulullah tidak hanya membina umat dalam aspek spiritual, tetapi juga mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu kaum dhuafa, serta menjadi tempat musyawarah dan pengambilan keputusan strategis terkait ekonomi dan sosial masyarakat Madinah.(Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013)

Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid merupakan sebuah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masjid dan jamaahnya. Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan taraf hidup secara material, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai spiritual, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi. Masjid, sebagai institusi yang sangat dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat.

Peran Strategis Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi

Masjid memiliki posisi strategis sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dan memiliki akses langsung ke berbagai lapisan umat. Dengan potensi dana yang terkumpul dari zakat, infak, sedekah, serta wakaf, masjid dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat. Beberapa peran strategis masjid dalam pemberdayaan ekonomi antara lain:

Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial-Ekonomi: Masjid dapat menjadi penghubung antara donatur dan mustahik (penerima manfaat), sehingga distribusi kekayaan menjadi lebih adil dan merata. Masjid memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi sosial-ekonomi yang dapat menjembatani antara donatur (pemberi dana) dan mustahik (penerima manfaat).(Tamuri, 2021) Dalam konteks masyarakat muslim, masjid sering kali menjadi tempat berkumpulnya para filantropis yang ingin menyisihkan sebagian hartanya melalui zakat, infak, dan sedekah. Melalui struktur pengelolaan yang baik, masjid dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, baik berupa bantuan konsumtif maupun modal usaha. Dengan demikian, masjid berperan aktif dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga dapat diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Distribusi kekayaan yang adil dan merata menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, dan masjid sebagai pusat komunitas dapat memastikan bahwa prinsip ini benar-benar terwujud

di tingkat masyarakat. Selain itu, masjid juga dapat berperan sebagai penyalur bantuan lain seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya yang ada.

Pusat Edukasi dan Pelatihan Ekonomi: Melalui program pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan ekonomi syariah, masjid dapat meningkatkan kapasitas ekonomi jamaahnya. Selain berperan sebagai lembaga intermediasi, masjid juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi dan pelatihan ekonomi bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan, keterampilan, dan penyuluhan ekonomi syariah, masjid dapat meningkatkan kapasitas ekonomi jamaah secara signifikan. Program pelatihan kewirausahaan, misalnya, dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan ide bisnis, mengelola keuangan, serta memahami prinsip-prinsip usaha yang sehat dan sesuai syariah. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan juga dapat memberikan bekal praktis bagi masyarakat untuk meningkatkan penghasilan mereka. Sementara itu, penyuluhan ekonomi syariah dapat memperkenalkan jamaah pada konsep-konsep keuangan Islam, seperti zakat, wakaf, dan investasi syariah, sehingga masyarakat lebih memahami manfaat dan urgensi pengelolaan keuangan secara Islami. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan potensi ekonomi umat. (Susilo, 2016)

Pengembangan Usaha Produktif: Masjid dapat menginisiasi koperasi syariah, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), toko serba ada, atau usaha lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Masjid juga dapat berperan sebagai inisiator pengembangan usaha produktif yang melibatkan masyarakat sekitar. Salah satu bentuk usaha produktif yang dapat dikembangkan di lingkungan masjid adalah koperasi syariah. Koperasi syariah ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan modal, membeli bahan baku secara kolektif, serta memasarkan produk hasil usaha anggota. Selain itu, masjid juga dapat mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan akses modal usaha, tabungan, dan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Toko serba ada di lingkungan masjid juga dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jamaah sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Usaha-usaha lain seperti catering, percetakan, atau jasa lainnya juga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya berbagai usaha produktif ini, masjid

tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Pemberdayaan Dana Sosial: Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dapat diarahkan untuk modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, atau bantuan modal kerja bagi keluarga kurang mampu. Pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah secara profesional sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dana sosial yang terkumpul dapat diarahkan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti modal usaha mikro bagi masyarakat yang membutuhkan, beasiswa pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, atau bantuan modal kerja bagi keluarga yang ingin memulai usaha. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana sosial dapat menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, masjid juga dapat mengembangkan program pendampingan dan monitoring bagi penerima bantuan, sehingga dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan dana sosial tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat secara luas.

Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

Agar pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan efektif, diperlukan manajemen yang baik dan profesional. Manajemen pemberdayaan ekonomi masjid mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

Perencanaan (*Planning*): Menyusun program-program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki masjid. Perencanaan adalah tahap paling awal dan sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Tahap ini, pengurus masjid melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan potensi yang dimiliki oleh jamaah serta masyarakat sekitar. (Ungusari, 2015) Analisis ini bertujuan untuk meng-identifikasi masalah utama yang dihadapi, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, atau keterbatasan akses modal dan pelatihan. (Hussin & et al, 2014)

Pengurus masjid merumuskan tujuan dan sasaran program pemberdayaan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro, atau pelatihan kewirausahaan. Perencanaan juga melibatkan penentuan strategi dan metode yang akan digunakan, seperti pembentukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), koperasi syariah, atau unit

usaha produktif lainnya. Selain itu, pengurus masjid perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik berupa dana, tenaga ahli, maupun fasilitas pendukung. Perencanaan yang matang akan memudahkan pengurus masjid dalam menentukan prioritas program, alokasi anggaran, serta target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. (ArjiHarahap, 2000) Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi yang dirancang benar-benar relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

Pengorganisasian (*Organizing*): Membentuk struktur organisasi atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ekonomi, seperti tim pengelola zakat, infak, sedekah, dan unit usaha masjid. (Chen et al., 2016) Setelah program dirancang, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap ini, pengurus masjid membentuk struktur organisasi atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. (Tamuri, 2021) Struktur organisasi ini dapat berupa tim pengelola zakat, infak, sedekah, atau unit usaha masjid yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi, keuangan, atau kewirausahaan. Pembentukan struktur organisasi yang jelas sangat penting untuk memastikan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara anggota tim. Selain itu, pengorganisasian juga melibatkan penentuan mekanisme kerja, sistem pelaporan, serta komunikasi antaranggota tim. Jika sumber daya manusia di lingkungan masjid terbatas, pengurus dapat melibatkan masyarakat sekitar, relawan, atau mitra eksternal seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah, atau organisasi masyarakat sipil.

Pelaksanaan (*Actuating*): Mengimplementasikan program-program ekonomi, mulai dari pendataan mustahik, penyaluran bantuan, hingga pelatihan dan pendampingan usaha. Pelaksanaan adalah tahap implementasi dari program-program pemberdayaan ekonomi yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Pada tahap ini, pengurus masjid melakukan berbagai aktivitas, seperti pendataan mustahik (penerima manfaat), penyaluran bantuan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan unit usaha produktif di lingkungan masjid. Pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Misalnya, dalam penyaluran bantuan modal usaha, pengurus masjid harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pelaksanaan program juga melibatkan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah dan masyarakat sekitar, sehingga mereka memahami manfaat dan tujuan dari program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan

program. Melalui pelatihan ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Pendampingan usaha juga diperlukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat dapat mengelola usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengawasan (*Controlling*): Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaporan kegiatan. Pengawasan merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pengurus masjid melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, mulai dari pengelolaan dana, penyaluran bantuan, hingga dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaporan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat evaluasi rutin, laporan keuangan yang transparan, serta audit internal atau eksternal jika diperlukan. Dengan pengawasan yang ketat, pengurus masjid dapat mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan, serta meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Selain itu, pengawasan juga melibatkan umpan balik dari penerima manfaat dan masyarakat sekitar.

Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu tantangan utama yang kerap dihadapi dalam implementasi pemberdayaan ekonomi berbasis masjid adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlanjutan setiap program pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid. Tanpa kedua elemen ini, program yang dijalankan rawan mengalami penyimpangan, baik secara moral maupun administratif, sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga masjid. Ketika pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka masyarakat akan sulit untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan.

Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi bisa menurun, bahkan tidak jarang masyarakat enggan untuk berpartisipasi atau memberikan kontribusi dana sosial kepada masjid. Padahal, partisipasi aktif dari masyarakat

sangat penting untuk memperkuat dukungan dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. (Hariyati & Wahdiyati, 2019)

Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahapan pengelolaan dana dan program. Sistem pelaporan ini harus mencakup pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran, dokumentasi penyaluran bantuan, serta evaluasi hasil program secara berkala. Selain itu, audit internal secara rutin juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dan program telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Audit internal ini dapat dilakukan oleh tim independen dari pengurus masjid atau melibatkan pihak eksternal seperti auditor dari lembaga keuangan syariah atau pemerintah. Selain sistem pelaporan dan audit internal, pelibatan jamaah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program juga sangat penting.

Dengan melibatkan jamaah, masjid dapat memperoleh masukan, saran, serta kritik yang membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan ekonomi. Pelibatan ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Misalnya, masjid dapat mengadakan forum diskusi atau musyawarah terbuka untuk membahas rencana kerja, pelaksanaan, serta hasil dari program pemberdayaan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan dengan integritas dan profesionalisme pengurus masjid. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengurus masjid dapat membangun reputasi yang baik di mata masyarakat dan donatur. Reputasi yang baik ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap masjid, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi akan semakin meningkat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau penyimpangan lain yang dapat merugikan masjid dan masyarakat. (Harahap & Amanah, 2018) Dalam konteks yang lebih luas, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen masjid. Masjid yang mampu mengelola dana dan program secara transparan dan akuntabel akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta mitra strategis lainnya. (Boko, 2019) Dukungan ini sangat penting untuk memperluas jangkauan dan dampak program pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid.

Konteks Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Masjid Raya Baiturrahman adalah salah satu masjid terbesar dan paling berpengaruh di Provinsi Aceh, bahkan menjadi ikon nasional yang sangat dikenali. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, masjid ini juga merupakan simbol keagamaan, budaya,

sejarah, serta perjuangan rakyat Aceh. Sejak didirikan pada masa Kesultanan Aceh hingga saat ini, Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi saksi sejarah berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Aceh. Keberadaan masjid ini juga menjadi bukti ketahanan masyarakat Aceh, terutama setelah selamat dari bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam, sehingga semakin memperkuat posisinya sebagai pusat spiritual dan sosial di tengah masyarakat.

Secara geografis, Masjid Raya Baiturrahman terletak di jantung Kota Banda Aceh, yang menjadikannya mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Lokasi strategis ini memungkinkan masjid untuk menjangkau jamaah dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota maupun luar kota. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sering menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat luas. Dari sisi ekonomi, Masjid Raya Baiturrahman memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat di Kota Banda Aceh. Potensi ini berasal dari beberapa faktor, antara lain besarnya jumlah jamaah yang berkunjung setiap hari, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masjid, serta besarnya dana sosial yang terkumpul setiap tahunnya. Dana sosial ini dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berasal dari masyarakat, pemerintah, maupun donatur lainnya.

Namun, optimalisasi peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya inovasi dan kreativitas dalam mengelola dana sosial secara produktif. Selama ini, sebagian besar dana sosial masih digunakan untuk keperluan operasional dan ibadah, sementara program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif masih terbatas. Selain itu, manajemen yang belum sepenuhnya profesional dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi kendala dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dan manajemen yang profesional dalam setiap tahapan program pemberdayaan ekonomi. Inovasi dapat berupa pengembangan unit usaha produktif seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), toko serba ada, atau usaha lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, pengelolaan dana sosial juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terhadap setiap program yang dijalankan.

Implementasi manajemen pemberdayaan ekonomi di Masjid Raya Baiturrahman dapat menjadi model bagi masjid-masjid lain di Indonesia. Dengan memanfaatkan dana sosial secara produktif, membangun kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, serta

melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program, masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, misalnya, dapat memperluas akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, (Hasibuan et al., 2022) yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh mengenai manajemen pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, sehingga data yang diperoleh bersifat natural dan kontekstual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus keuangan di bidang wakaf, sedekah, dan zakat, serta penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi (Balaka, 2022) langsung terhadap proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemberdayaan di lingkungan masjid. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen resmi terkait pengelolaan keuangan serta pemberdayaan ekonomi di masjid tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan, diseleksi, dan dideskripsikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai fenomena yang diteliti. (Diri et al., 2016) Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan manajemen pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Masjid sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Penelitian mengenai manajemen pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh menghasilkan temuan-temuan yang cukup signifikan terkait peran masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumen, terungkap bahwa Masjid Raya Baiturrahman dikelola secara modern oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD di bawah Dinas Syariat Islam Aceh. Struktur manajemen ini memungkinkan pengelolaan keuangan

dan aset masjid yang lebih profesional dan akuntabel, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi umat dapat lebih optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman memiliki beberapa aktivitas ekonomi yang cukup nyata, seperti pengelolaan parkir, penyelenggaraan pernikahan, dan pengelolaan dana wakaf, zakat, serta sedekah yang didistribusikan untuk kepentingan pemberdayaan umat. Aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengelola masjid, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan dari aktivitas masjid, seperti pendapatan tenaga kerja yang terlibat, cukup signifikan, dan pengeluaran tenaga kerja tersebut juga berkontribusi pada sirkulasi ekonomi di Kota Banda Aceh.

Wawancara bersama Ustad Mauliza “Semenjak masjid ini dikelola oleh BLUD, kami menerapkan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Keuangan tercatat dengan rapi, dan setiap aktivitas ekonomi seperti pengelolaan parkir, penyewaan aula nikah, sampai distribusi zakat dan wakaf, dikelola dengan sistem yang akuntabel. Ini memberi ruang bagi masjid untuk lebih maksimal dalam memberdayakan masyarakat, bukan hanya secara spiritual tapi juga ekonomi.”

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ini berasal dari sumber daya manusia, lembaga dan jaringan yang telah terbentuk di lingkungan masjid, iklim usaha, serta dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya bersama Miswar Muhammad “Kami sudah menyalurkan bantuan usaha mikro, menyediakan pelatihan keterampilan seperti kewirausahaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta merancang pembentukan koperasi syariah. Bahkan, kami juga sedang dalam proses finalisasi pembentukan BMT. Tujuannya, agar masjid ini punya instrumen keuangan sendiri untuk menopang ekonomi jamaah.”

Pembentukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan koperasi syariah di lingkungan masjid dipandang sebagai langkah awal dalam optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Aktivitas ekonomi yang dimotori oleh BMT dan koperasi syariah dapat menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaah dan masyarakat di sekitar masjid, baik melalui pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, maupun pendampingan usaha.

Sebagai Perwakilan Dinas Syariat Islam disampaikan oleh Mardhatillah, “Banyak warga di sekitar masjid yang terbantu. Misalnya, anak muda yang tadinya pengangguran kini terlibat dalam pengelolaan parkir. Beberapa ibu rumah tangga juga mendapat modal usaha kecil dari dana sedekah yang disalurkan oleh masjid. Saya sendiri menyaksikan banyak perubahan, terutama dalam hal semangat masyarakat untuk mandiri.”

Namun, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas manajerial pengurus masjid dalam mengelola dana dan program pemberdayaan ekonomi secara profesional. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam hal transparansi dan pelaporan keuangan, Sehingga diperlukan penguatan sistem manajemen dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Pengurus masjid juga perlu membangun kemitraan dengan lembaga pengembangan ekonomi masyarakat, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), lembaga keuangan syariah, dan konsultan UMKM, untuk memperkuat perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan ekonomi.

Kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah dan juga mitra dari pemerintah daerah. Tapi memang, kerja sama ini harus terus diperluas, terutama dengan konsultan UMKM dan kelompok swadaya masyarakat. Kami butuh pendampingan berkelanjutan agar program-program ini bisa berdampak jangka panjang. Ucap Ustd Miswar Muhammad

Pembahasan hasil penelitian ini menekankan pentingnya optimalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Raya Baiturrahman memiliki aset dan sumber daya yang cukup besar, serta akses terhadap dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah.

Tantangan terbesar adalah kapasitas SDM. Belum semua pengurus punya latar belakang manajerial atau keuangan, jadi kami sedang mendorong pelatihan internal. Juga, sistem pelaporan dan transparansi keuangan masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan publik semakin kuat. Pengelola SDM Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Abdurrani.

Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh

Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, masjid ini dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di Kota Banda Aceh. Program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh masjid, seperti pembentukan BMT,

koperasi syariah, serta pelatihan kewirausahaan, terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masjid juga dapat berperan sebagai pusat edukasi dan pengembangan keahlian, sehingga jamaah dan masyarakat sekitar dapat memperoleh akses terhadap modal, pelatihan, dan pemasaran untuk usaha mereka.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tidak hanya terbatas pada usaha-usaha memproduksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan, pembiayaan atau akses permodalan, serta akses pemasaran bagi usaha mikro dan kecil. Jika setiap masjid di Kota Banda Aceh berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan ratusan kepala keluarga, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat di Kota Banda Aceh. Pengelolaan keuangan dan aset yang modern, serta pengembangan program-program ekonomi produktif, dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan penguatan manajemen, transparansi keuangan, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dengan langkah strategis ini, diharapkan masjid dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat di Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh berpotensi besar menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, selain sebagai tempat ibadah dan simbol budaya. Pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, seperti melalui aktivitas ekonomi dan pembinaan usaha mikro. Namun, pengelolaan yang optimal masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas pengurus, kurangnya inovasi program, serta transparansi dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi juga penting agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan dan dapat berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang terstruktur, penguatan kapasitas pengurus, inovasi program, serta kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan

pemerintah. Dengan langkah ini, Masjid Raya Baiturrahman diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang efektif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- ArjiHarahap, S. (2000). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.
- Boko, Y. A. (2019). Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah Dan Teori Organisasi Klasik). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)*, 3(2), 9–25.
- Chen, C., Ma, J., Susilo, Y., Liu, Y., & Wang, M. (2016). The promises of big data and small data for travel behavior (aka human mobility) analysis. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 68, 285–299. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.04.005>
- Diri, K., Abdi, A., & Keraton, D. (2016). *YOGYAKARTA 2016 i*. 1–23.
- Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, K. (2013). Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 13(1), 58–70.
- Hanafiah, A. (2011). Strategi pelayanan kesehatan Haji kantor kementerian Agama Kabupaten Bogor terhadap Jama'ah Haji tahun 2010. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2962%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2962/1/ALI_HANAFIAH-FDK.PDF
- Harahap, D. A., & Amanah, D. (2018). Pengantar Manajemen. *Penerbit Alfabeta Bandung*, September, 205. <https://www.researchgate.net/publication/327631445>
- Haramain, M., & Dakwah, M. (2025). *Manajemen Masjid sebagai Solusi Krisis Fungsi Sosial-Keagamaan : Literature Review*. 1–13.
- Hariyati, F., & Wahdiyati, D. (2019). Penguatan Dakwah Virtual Sebagai Upaya Memakmurkan Masjid Berbasis Kegiatan Remaja Masjid. *Jurnal SOLMA*, 8(2), 239. <https://doi.org/10.29405/solma.v8i2.3392>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hussin, M. Y. M., & et al. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Keupayaan

- Pengembangan Dana Masjid. *Sains Humanika*, 2, 13–21. www.sainshumanika.utm.my
- Ikhwan, A. (2013). Optimalisasi peran Masjid dalam Pendidikan Anak: Perspektif Makro dan Mikro. *Edukasi*, 01(01), 6–7.
- Layyinaturrobaniyah, L. (2019). Lembaga Keuangan Mikro Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 21(2), 140–143. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19516>
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681>
- Tamuri, A. H. (2021). Konsep Dan Pelaksanaan Fungsi Masjid Dalam Memartabatkan Masyarakat. *International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*, 1–12. <https://doi.org/10.53840/almimbar.v1i1.11>
- Ungusari, E. (2015). No Title空間像再生型立体映像の研究動向. *Nbk技研*, 151(1), 10–17.